

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kegiatan strategis pada tingkat pemerintahan desa yang memerlukan manajemen yang efektif. Efektivitas pengelolaan dana desa berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengelolaan dana desa yang efektif akan berdampak pada kinerja organisasi pemerintahan desa dalam mencapai tujuan pembangunan. Proses pengelolaan ini memerlukan kemampuan manajerial yang baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Implementasi manajemen dana desa yang optimal dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta keberhasilan program (Steers, 1985). Kajian terhadap efektivitas pengelolaan dana desa menjadi penting sebagai masukan untuk perbaikan manajemen di masa mendatang.

Efektivitas pengelolaan dana desa sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ukuran efektivitas ini dapat dilihat dari pencapaian target program, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator penting dalam mendorong kepala desa dan perangkat desa mencapai program prioritas, misalnya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini menekankan pengumpulan data

melalui responden sebagai subjek utama, sehingga memungkinkan diperolehnya gambaran holistik mengenai permasalahan yang ada. Pendekatan ini juga memfasilitasi analisis yang mendalam untuk merumuskan strategi pengelolaan dana desa yang lebih efektif. Menurut Steers (1985), efektivitas organisasi dapat dicapai melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, yaitu kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan serta kondisi sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan program dana desa, hambatan dapat muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Hambatan ini harus diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan optimal dan mendukung pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan UMKM.

UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Kwartono (dalam Dharma et al., 2023), UMKM adalah kegiatan ekonomi dengan total kekayaan tidak lebih dari 200 juta rupiah, terlepas dari aset tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah diklasifikasikan berdasarkan omzet tahunan, jumlah aset, dan jumlah tenaga kerja. Kriteria tersebut digunakan dalam pengurusan izin usaha serta penentuan besaran pajak yang dibebankan kepada pelaku UMKM.

UMKM memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara efektif agar target pembangunan yang telah

ditetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dapat tercapai, baik dari segi output maupun outcome.

Peran UMKM di desa sangat signifikan dalam menopang ekonomi masyarakat. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaku UMKM agar tetap dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan UMKM harus dilakukan secara terstruktur agar pelaksanaan program berjalan optimal. Namun, berbagai hambatan, seperti manajemen usaha yang lemah, kualitas produk rendah, dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, seringkali menghambat pengelolaan UMKM, ditambah dengan kendala modal (Aliyah, 2022). Tantangan lain yang dihadapi UMKM meliputi akses permodalan, penguasaan teknologi, pemasaran, dan regulasi yang belum optimal. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui program pendampingan, pelatihan, skema pendanaan, dan insentif bagi pengembangan UMKM.

Tabel 1. 1 Situasi Problematis Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan UMKM di Desa Pero Konda

No.	Indikator	Target	Realisasi
1	Penyerapan dana desa	100.000.000	80.000.000
2	Jumlah UMKM yang terberdayakan	10 usaha	5 usaha (3 usaha cumi, 2 usaha ikan kering)
3	Rata-rata peningkatan pendapatan UMKM	200.000.000	100.000.000
4	Pelatihan dan pendampingan UMKM	4 kali/tahun	2 kali/tahun
5	Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes	600 orang	400 orang

Sumber: Kantor Desa Pero Konda, 2020

Berdasarkan tabel di atas, beberapa permasalahan yang dihadapi Desa Pero Konda antara lain:

1. Penyerapan dana desa hanya mencapai 80% dari target, menunjukkan kendala dalam pengelolaan dana desa.
2. Jumlah UMKM yang terberdayakan hanya 5 dari 10 target, menunjukkan masih terdapat selisih 3 usaha.
3. Rata-rata peningkatan pendapatan UMKM hanya mencapai 50% dari target, mengindikasikan dampak pemberdayaan yang rendah.
4. Frekuensi pelatihan dan pendampingan UMKM baru terlaksana 50% dari target, menunjukkan dukungan kapasitas UMKM yang belum optimal.
5. Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes mencapai 400 orang dari target 600 orang, menunjukkan partisipasi yang belum maksimal.

Dana desa diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi. Permasalahan desa terkait keterbatasan anggaran menjadi latar belakang lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Dana Desa (DD) bersumber dari APBN, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat (Sari, 2017). Implementasi Dana Desa menekankan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Menurut Sadu Wasistiono (dalam Salim, 2021), pembiayaan merupakan faktor esensial dalam mendukung otonomi desa. Alokasi Dana Desa di Desa Pero Konda sesuai juknis adalah 30% untuk pemerintahan dan 70% untuk infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Namun, fokus lebih banyak tercurah pada pembangunan infrastruktur, sementara pemberdayaan masyarakat, misalnya

melalui UMKM, masih terbatas. Potensi desa, khususnya di wilayah pesisir, dapat dimaksimalkan melalui pengembangan UMKM kreatif dan produktif untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan dengan prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat diyakini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Seluruh aparatur desa harus berkomitmen dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, data menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara alokasi dan realisasi dana desa untuk UMKM. Hal ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai pengelolaan dana desa dalam pengembangan UMKM di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana proses penggunaan Dana Desa dalam pengembangan UMKM di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penggunaan Dana Desa dalam pengembangan UMKM di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait pengelolaan Dana Desa, khususnya sebagai dana bantuan bagi pengembangan UMKM masyarakat Desa Pero Konda.
- b. Menjadi sumber data dan informasi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Memberikan gambaran kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai proses perencanaan, pengelolaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Dana Desa di Desa Pero Konda.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.
- b. Memperluas wawasan penulis di bidang ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait pengelolaan dana desa dan pemberdayaan UMKM.
- c. Menjadi sumber data atau referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam penelitian yang relevan di masa mendatang.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan yang menekankan pengumpulan data melalui responden sebagai subjek utama penelitian. Metode ini memungkinkan responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya secara mendalam, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran holistik mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga memfasilitasi analisis

mendalam terhadap proses, faktor-faktor, dan dinamika yang memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pengembangan UMKM di Desa Pero Konda.